

**SKRIPSI**  
**PENGARUH *CORPORATE GOVERNANCE*, UKURAN PERUSAHAAN,  
*LEVERAGE*, DAN *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* TERHADAP  
*TAX AVOIDANCE* PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR SUBSEKTOR  
MAKANAN DAN MINUMAN YANG TERDAFTAR  
DI BEI PERIODE 2016**

**Diajukan untuk memenuhi persyaratan mencapai gelar Sarjana Ekonomi**

**Dosen Pembimbing: Moh. Mahsun M.Si, Ak, CPA**



**Oleh :**

**ANINDITA MARIBETH CINTYA MAHESWARI**

**163215772**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI  
WIDYA WIWAHA  
2018**

## INTISARI

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh *corporate governance*, ukuran perusahaan, *leverage*, dan *corporate social responsibility* terhadap *Tax Avoidance*. *Tax Avoidance* digunakan sebagai variabel *dependen*, sedangkan *corporate governance*, ukuran perusahaan, *leverage*, dan *corporate social responsibility* digunakan sebagai variabel independen.

Penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 10 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2016. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode *purposive sampling*. Penelitian ini menggunakan uji regresi berganda dalam pengujian hipotesis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *corporate governance* dan *leverage* tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* sedangkan ukuran perusahaan dan *corporate social responsibility* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.

**Kata kunci:** *corporate governance*, ukuran perusahaan, *leverage*, *corporate social responsibility*, *tax avoidance*

STIE Widya Wiyata  
Jangan Plagiat

## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan kemudahan, karunia, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul: **“PENGARUH CORPORATE GOVERNANCE, UKURAN PERUSAHAAN, LEVERAGE, DAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY TERHADAP TAX AVOIDANCE PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR SUBSEKTOR MAKANAN DAN MINUMAN YANG TERDAFTAR DI BEI PERIODE 2016”**.

Penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari bimbingan dan dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada:

1. Bapak Moh. Mahsun M.Si, Ak, CPA., selaku dosen pembimbing penulis beserta istri, Tante Anik Mahsun, yang selalu memberikan arahan, bimbingan, dan semangat penulis dalam menyelesaikan skripsi.
2. Orangtua penulis, Papa Sugeng dan Mama Srinon, selalu memberikan doa yang tak pernah putus kepada penulis.
3. Condro Triharyono, motivasi terbesar penulis dalam menyelesaikan skripsi.
4. Keluarga penulis, Anindwitya Rizqi Monica yang kadang-kadang menjadi tempat mengadu nasib skripsi.
5. Sahabat penulis, Densa Mayang dan Martini Nur Pratiwi sebagai ‘tong sampah’ segala cerita tentang skripsi maupun pekerjaan.
6. Rekan kantor penulis, Mbak Marsha yang selalu menanyakan kabar skripsi, dan manajer penulis, Pak Adi yang selalu memberikan waktu penulis merevisi skripsi di kantor.
7. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu per satu. Terimakasih!

Yogyakarta, 28 Februari 2018

Anindita Maribeth CM

## DAFTAR ISI

HALAMAN PERNYATAAN .....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iv
INTISARI .....	v
ABSTRACT .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI .....	viii
DAFTAR TABEL .....	x
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian .....	4
D. Manfaat Penelitian .....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	6
A. Landasan Teori .....	6
1. Teori Agensi .....	6
2. Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) .....	7
3. <i>Corporate Governance</i> .....	7
4. Ukuran Perusahaan .....	9
5. <i>Leverage</i> .....	10
6. <i>Corporate Social Responsibility (CSR)</i> .....	10
B. Penurunan Hipotesis .....	11
1. <i>Corporate Governance</i> dan <i>Tax Avoidance</i> .....	11
2. Ukuran Perusahaan dan <i>Tax Avoidance</i> .....	14
3. <i>Leverage</i> dan <i>Tax Avoidance</i> .....	15
4. <i>Corporate Social Responsibility</i> dan <i>Tax Avoidance</i> .....	15
BAB III METODE PENELITIAN .....	17
A. Obyek Penelitian .....	17
B. Jenis Data .....	17
C. Teknik Pengambilan Sampel .....	18
D. Teknik Pengumpulan Data .....	18
E. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel .....	19
1. Variabel Dependen .....	19
2. Variabel Independen .....	19
a. Kepemilikan Manajerial (KM) .....	20
b. Kepemilikan Institusional (KI) .....	20
c. Dewan Komisaris (DK) .....	21
d. Komite Audit (KoA) .....	21
e. Kualitas Audit (KuA) .....	21
f. Ukuran Perusahaan ( <i>Size</i> ) .....	22
g. <i>Leverage (Lev)</i> .....	22
h. <i>Corporate Social Responsibility (CSR)</i> .....	22
F. Uji Kualitas Data .....	23

1. Uji Statistik Deskriptif.....	23
2. Uji Asumsi Klasik .....	23
3. Uji Hipotesis.....	24
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	26
A.    Gambaran Umum Obyek Penelitian .....	26
B.    Uji Statistik Deskriptif .....	26
C.    Uji Asumsi Klasik .....	28
1. Uji Multikolinearitas .....	28
2. Uji Autokorelasi .....	29
3. Uji Heteroskedastisitas .....	29
4. Uji Normalitas .....	30
D.    Uji Hipotesis .....	30
1. Koefisien Determinasi .....	30
2. Uji Pengaruh Simultan (Uji Nilai F) .....	31
3. Uji Parsial (Uji Nilai t) .....	32
E.    Pembahasan .....	35
BAB V SIMPULAN, SARAN, DAN KETERBATASAN PENELITIAN.....	41
A.    Simpulan .....	41
B.    Saran.....	42
C.    Keterbatasan Penelitian.....	42
DAFTAR PUSTAKA .....	44
LAMPIRAN.....	46
LAMPIRAN.....	47

STIE Widya Wivaha  
Jangan Plagiat!

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2012 - 2016 (Dalam Triliun Rupiah).....	1
Tabel 2. Proses Pengambilan Sampel .....	26
Tabel 3. Statistik Deskriptif .....	27
Tabel 4. Hasil Uji Multikolinearitas.....	28
Tabel 5. Hasil Uji Autokorelasi .....	29
Tabel 6. Hasil Uji Heteroskedastisitas .....	29
Tabel 7. Hasil Uji Normalitas .....	30
Tabel 8. Hasil Uji Koefisien Determinasi .....	31
Tabel 9. Hasil Uji Pengaruh Simultan.....	31
Tabel 10. Hasil Uji Parsial.....	32
Tabel 11. Ringkasan Hasil Pengujian Hipotesis .....	34

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara. Pemerintah Indonesia dari tahun ke tahun semakin gencar melakukan optimalisasi penerimaan pajak. Perusahaan merupakan salah satu wajib pajak yang berkewajiban untuk membayar pajak kepada negara. Perusahaan membayar pajak kepada negara karena pajak bersifat memaksa dan apabila perusahaan tidak membayar akan dikenakan sanksi yang merugikan perusahaan.

Data target dan realisasi penerimaan pajak tahun 2012-2016 disajikan dalam Tabel 1.

**Tabel 1. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2012 - 2016 (Dalam Triliun Rupiah)**

	2012	2013	2014	2015	2016
<b>Target</b>	1,016.0	1,148.4	1,246.1	1,489.3	1,539.2
<b>Realisasi</b>	981.0	1,077.0	1,146.9	1,240.4	1,094.2
<b>Presentase</b>	96.6%	93.8%	92.0%	83.3%	71.1%

Sumber : [www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id), 2016

Dalam lima tahun terakhir realisasi penerimaan pajak tidak sesuai dengan target. Pemerintah telah melakukan upaya-upaya dalam mengoptimisasi penerimaan pajak dengan cara menurunkan tarif pajak badan yang tadinya sebesar 28% menjadi 25%. Pemerintah juga menyederhanakan pajak dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013.

Salah satu penyebab penerimaan pajak tidak sesuai dengan target padahal pemerintah telah melakukan upaya optimalisasi penerimaan pajak adalah adanya penghindaran pajak atau *tax avoidance*. *Tax avoidance* merupakan segala sesuatu

yang dilakukan perusahaan yang berakibat pada pengurangan terhadap pajak perusahaan (Dyreng, Hanlon, dan Maydew 2008).

*Corporate governance* merupakan tata kelola perusahaan yang menjelaskan hubungan antara berbagai partisipan dalam perusahaan yang menentukan arah kinerja perusahaan (Haruman, 2008). *Corporate Governance* berperan penting dalam mengendalikan akibat dari permasalahan agensi dalam praktek penghindaran pajak (Desai dan Dharmapala 2006; Armstrong et al. 2013).

Dalam penelitian sebelumnya ditemukan bahwa *corporate governance* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* (Khoala 2013; Rego dan Wilson 2008; Sabli dan Noor 2012; Kurniasih dan Sari 2013; Maharani dan Suardana 2014; Dewi dan Jati 2014; Prakosa 2014). Penelitian lain menemukan bahwa *corporate governance* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *tax avoidance* (Armstrong et al. 2013; Desai dan Dharmapala 2006; Minnick dan Noga 2010; James dan Igbeng 2014; Darmawan dan Sukartha 2014; Syeldila dan Niki 2015).

Faktor lain yang dianggap mampu mendorong *tax avoidance* adalah ukuran perusahaan. Machfoedz (1994) dan Suwito dan Herawati (2005) menyatakan bahwa ukuran perusahaan merupakan suatu skala yang dapat mengelompokkan perusahaan menjadi perusahaan besar dan kecil menurut berbagai cara seperti contoh, ukuran perusahaan bisa kita lihat melalui total aset perusahaan yang dimiliki, nilai pasar saham, rata-rata tingkat penjualan, dan jumlah penjualan.

Penelitian yang dilakukan oleh Nugroho (2011), Adelina (2012), Fatharani (2012), Darmawan (2014), Calvin (2015), Asfiyati (2012), Kristiana (2013), dan Ida Ayu dan Putu (2016) menemukan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh pada *tax avoidance*. Hal ini bertentangan dengan penelitian Kurniasih dan Maria (2013) yang menemukan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *tax avoidance*.

*Leverage* (struktur utang) merupakan rasio yang menunjukkan besarnya utang yang dimiliki oleh perusahaan untuk membiayai aktivitas operasinya. Penambahan jumlah utang akan mengakibatkan munculnya beban bunga yang

harus dibayar oleh perusahaan. Komponen beban bunga akan mengurangi laba sebelum kena pajak perusahaan, sehingga beban pajak yang harus dibayar perusahaan akan menjadi berkurang (Adelina, 2012).

Richardson dan Lanis (2007), Kurniasih dan Maria (2013) dan Darmawan (2014) menemukan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Calvin (2015), Ida Ayu dan putu (2016), dan Vidiyyana dan Bella (2017) menemukan bahwa *leverage* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *tax avoidance*.

*Corporate Social Responsibility* (CSR) merupakan suatu bentuk komitmen bisnis untuk bertindak secara etis, berkontribusi pada pembangunan ekonomi, dan meningkatkan kualitas hidup pekerja dan masyarakat pada umumnya (Holme dan Watts, 2006 dalam Lanis dan Richardson, 2012). Watson (2011) menyatakan bahwa perusahaan yang mempunyai peringkat rendah dalam *Corporate Social Responsibility* (CSR) dianggap sebagai perusahaan yang tidak bertanggung jawab secara sosial sehingga dapat melakukan strategi pajak yang lebih agresif dibandingkan perusahaan yang sadar sosial. Hal yang serupa diungkapkan oleh Hoi, et al (2013) perusahaan dengan kegiatan CSR yang tidak bertanggung jawab lebih agresif dalam menghindari pajak.

Perusahaan manufaktur adalah suatu perusahaan yang aktivitasnya mengelola bahan mentah atau bahan baku sehingga menjadi barang jadi lalu menjualnya kepada konsumen. Aktivitas perusahaan manufaktur disebut proses produksi.

Pada tahun 2012, perusahaan manufaktur mengalami pertumbuhan paling besar dibandingkan sektor perusahaan lainnya yaitu sebesar 4,12%. Kontribusi PPN dan PPh periode 2010-2012 perusahaan manufaktur pun meningkat setiap tahunnya. Meskipun pertumbuhan dan kontribusi pajak perusahaan manufaktur meningkat, tetap terdapat kesenjangan antara realisasi penerimaan pajak dan penerimaan pajak yang seharusnya diterima Direktorat Jenderal Pajak.

Kesenjangan penerimaan yang terjadi disebabkan oleh rendahnya kepatuhan penyetoran pajak, masih banyaknya transaksi yang tidak tercatat (*underground*

*economy*) dan adanya kecenderungan penghindaran pajak ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id) diakses pada 23 Oktober 2014 dalam Astuti dan Aryani, 2016:376).

Penelitian yang dilakukan oleh Astuti dan Aryani (2016) menemukan bahwa perusahaan manufaktur banyak yang melakukan praktik penghindaran pajak. Hal ini dibuktikan dengan tren penghindaran pajak perusahaan manufaktur periode tahun 2001 - 2014 yang terus meningkat.

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “PENGARUH *CORPORATE GOVERNANCE*, UKURAN PERUSAHAAN, *LEVERAGE*, DAN *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* TERHADAP *TAX AVOIDANCE* PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR SUBSEKTOR MAKANAN DAN MINUMAN YANG TERDAFTAR DI BEI PERIODE 2016”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah *corporate governance* berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
2. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
3. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
4. Apakah *corporate social responsibility* berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
5. Apakah *corporate governance*, ukuran perusahaan, *leverage*, dan *corporate social responsibility* berpengaruh terhadap *tax avoidance* secara simultan?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dibahas sebelumnya, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk menguji dan memperoleh bukti secara empiris tentang:

1. Pengaruh *corporate governance* terhadap *tax avoidance*.

2. Pengaruh ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance*.
3. Pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance*.
4. Pengaruh *corporate social responsibility* terhadap *tax avoidance*.
5. Pengaruh *corporate governance*, ukuran perusahaan, *leverage*, dan *corporate social responsibility* terhadap *tax avoidance* secara simultan.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi akademisi, memberi pemahaman dan penjelasan mengenai *tax avoidance* yang berhubungan dengan *corporate governance*, ukuran perusahaan, *leverage*, dan *corporate social responsibility*.
2. Bagi akademisi, untuk menambah literatur dalam bidang akuntansi dan dapat dijadikan referensi penelitian masa datang.
3. Bagi masyarakat, untuk memberikan gambaran mengenai sikap perusahaan di Indonesia mengenai kewajiban membayar pajak dan kepatuhan pajak di Indonesia.
4. Bagi pemerintah, untuk menjadi bahan pertimbangan dalam membuat kebijakan-kebijakan dalam bidang perpajakan yang lebih baik.

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### A. Landasan Teori

#### 1. Teori Agensi

Menurut Anthony dan Govindarajan (2005:269), hubungan agensi terjadi ketika salah satu pihak yang bertindak sebagai pihak yang menyewa pihak lain (*principal*) untuk melaksanakan suatu jasa dan dalam melakukan hal itu mendelegasikan wewenang untuk membuat keputusan kepada pihak yang disewa (*agent*) tersebut.

Hubungan antara pemilik saham dengan manajer menjadi implementasi teori agensi dalam sebuah perusahaan. Pemilik saham (*principal*) mendelegasikan wewenang kepada manajer (*agent*) untuk mengelola perusahaan dengan harapan dapat menghasilkan kinerja dan *return* yang baik bagi pemilik saham.

*Principal* sebagai pemilik modal memiliki akses pada informasi internal perusahaan sedangkan *agent* sebagai pelaku dalam praktek operasional perusahaan mempunyai informasi tentang operasi dan kinerja perusahaan secara riil dan menyeluruh. Posisi, fungsi, situasi, tujuan, kepentingan dan latar belakang prinsipal dan agen yang berbeda dan saling bertolak belakang tersebut akan menimbulkan pertentangan dengan saling tarik menarik kepentingan (*conflict of interest*) dan pengaruh antara satu sama lain (Novitasari dan Wirama, 2015:1207).

Dalam penelitian ini, konflik terjadi terhadap kepentingan laba perusahaan antara pemungut pajak (fiskus) dengan pembayar pajak (perusahaan). Fiskus berharap optimalisasi pemasukan dari pajak sedangkan pihak perusahaan berpikir untuk menghasilkan laba dengan beban pajak yang rendah. Dua sudut pandang berbeda inilah menyebabkan konflik antar fiskus sebagai pemungut pajak dengan pihak manajemen perusahaan sebagai pembayar pajak (Prakosa, 2014 dalam Dianing, 2016:183).

## 2. Penghindaran Pajak (Tax Avoidance)

Suandy (2011:21) menyatakan bahwa penghindaran pajak adalah suatu usaha pengurangan secara legal yang dilakukan dengan cara memanfaatkan ketentuan-ketentuan di bidang perpajakan secara optimal seperti, pengecualian dan pemotongan-pemotongan yang diperkenankan maupun manfaat hal-hal yang belum diatur dan kelemahan-kelemahan yang ada dalam peraturan-peraturan yang berlaku.

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) tidak melanggar undang-undang perpajakan karena usaha Wajib Pajak untuk mengurangi, menghindari, meminimumkan atau meringankan beban pajak dilakukan dengan cara yang dimungkinkan oleh undang-undang perpajakan (Sari dan Kurniasih, 2013:61).

Menurut Landolf (2016, dalam Natasya, 2014:3) penghindaran pajak perusahaan merupakan salah satu tindakan yang tidak bertanggung jawab sosial oleh perusahaan. karena perusahaan yang melakukan penghindaran pajak dianggap tidak memberikan kontribusi kepada pemerintah dalam rangka upaya mencapai kesejahteraan umum.

## 3. Corporate Governance

*Corporate Governance* diartikan sebagai rangkaian kebijakan yang mempengaruhi pengarahannya, pengelolaan, serta pengontrolan suatu perusahaan. Tata kelola perusahaan juga mencakup hubungan antara pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang terlibat serta tujuan pengelolaan perusahaan. Tata kelola perusahaan merupakan subyek yang memiliki banyak tatanan. Salah satu aspek utama yang termasuk tata kelola suatu entitas atau perusahaan adalah menyangkut masalah akuntabilitas, tanggung jawab, khususnya penerapan yang berasal dari pedoman dan mekanisme untuk memberi kepastian perilaku yang baik dan memberi perlindungan bagi kepentingan saham.

Pengukuran *corporate governance* dalam penelitian ini menggunakan variabel kepemilikan yang dimiliki oleh manajerial, kepemilikan yang

dimiliki institusional, prosentase dewan komisaris independen, komite yang berkepentingan dalam audit dan kualitas auditor yang digunakan sebagai variabel dari *corporate governance* mengacu pada penelitian Fadhila, (2014) serta Pramudito dan Sari, (2015) yang telah dipaparkan sebagai berikut :

**a. Kepemilikan Manajerial**

Kepemilikan saham manajerial diduga dapat menyamakan antara kepentingan pemegang saham oleh manajer, karena manajer ikut merasakan langsung manfaat dari keputusan yang diambil dan manajer juga akan menanggung risiko apabila mengalami kerugian yang ada sebagai konsekuensi dari pengambilan keputusan yang salah (Pujiati, 2015:37).

**b. Kepemilikan Institusional**

Kepemilikan institusional merupakan kondisi dimana institusi memiliki saham dalam suatu perusahaan. Institusi tersebut dapat berupa institusi pemerintah, institusi swasta, domestik maupun asing, maupun masyarakat umum yang memiliki saham lebih dari 5% (Widarjo,2010 dalam Ayu, 2016:4). Kepemilikan institusional terdapat 2 jenis yaitu kepemilikan minoritas dan mayoritas. Kepemilikan saham oleh institusional mayoritas adalah institusi yang memiliki saham lebih dari 5% sedangkan minoritas kurang dari 5% (Pujiati, 2015:39).

**c. Dewan Komisaris**

Komisaris independen didefinisikan sebagai seorang yang tidak terafiliasi dalam segala hal dalam pemegang saham pengendali. Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan direksi atau dewan komisaris, serta tidak menjabat sebagai direktur pada suatu perusahaan yang terkait. Pada Bursa Efek Indonesia terdapat aturan yaitu bahwa sebuah perusahaan minimal harus memiliki 30% dewan komisaris independen, dengan demikian pengawasan dapat dilakukan sedemikian rupa (Pohan, 2008; dalam Annisa dan Kurniasih, 2012:125).

#### **d. Komite Audit**

Pembentukan komite audit bertujuan sebagai membantu komisaris audit menjadi pihak pengawas sebagai efektifitas pengendalian intern dan efektifitas tugas auditor luar dan dalam entitas tersebut. Komite audit setidaknya memiliki akses terhadap pihak manajerial maupun pihak internal serta segala informasi terkait entitas. Komite audit berfungsi untuk membantu pihak manajerial dalam intermediaries atau penghubung antara pihak manajerial perusahaan dengan auditor eksternal perusahaan (Toha, 2008 dalam Annisa dan Kurniasih, 2012:126).

#### **e. Kualitas Audit**

Tranparansi terhadap pemegang saham dapat tercapai apabila perusahaan melaporkan hal yang terkait dengan perpajakan pada pasar modal dan pada rapat dengan pemegang saham. Peningkatan tranparansi terhadap pemegang saham dalam perpajakan semakin dituntut oleh publik. Sering kali publik beranggapan terhadap perilaku pajak yang agresif. Kualitas Audit dilihat dengan kualitas auditornya yang diukur lewat jenis KAP yang digunakan perusahaan dalam memeriksa laporan perusahaan. KAP mengaudit suatu laporan keuangan berpedoman pada standart pengendalian mutu kualitas audit oleh Dewan Standar Profesional Akuntan Publik Institut Akuntan Publik Indonesia (DSPAP IAPI) dan aturan akuntan publik yang ditetapkan oleh IAPI sehingga dalam pelaksanaannya sudah didasarkan pada aturan yang ada (Winata, 2014:8).

### **4. Ukuran Perusahaan**

Secara umum biasanya ukuran perusahaan diproksi dengan total asset karena nilai total asset biasanya sangat besar dibandingkan variabel keuangan lainnya, maka dengan maksud untuk mengurangi peluang heteroskedastis, vatiabel asset 'diperhalus' menjadi Log (asset) atau Ln (asset) (Asnawi dan Wijaya, 2005:274).

Tahap kedewasaan perusahaan ditentukan berdasarkan total aset, semakin besar total aset menunjukkan bahwa perusahaan memiliki prospek baik dalam jangka waktu yang relatif panjang Dharma dan Ardiana (2015:594).

Perusahaan yang besar ini tentunya membutuhkan dana yang lebih banyak dibandingkan dengan perusahaan kecil. Dengan demikian, perusahaan menginginkan pendapatan yang besar. Sudarmadji dan Sularto (2007) dalam Ardansyah (2014:15) menyatakan semakin besar aktiva maka semakin banyak modal yang ditanam dan semakin besar perputaran uang.

## 5. *Leverage*

*Leverage* adalah salah satu rasio keuangan yang menggambarkan hubungan antara hutang perusahaan terhadap modal maupun aset perusahaan. Rasio *leverage* menggambarkan sumber dana operasi yang digunakan oleh perusahaan. Rasio *leverage* juga menunjukkan risiko yang dihadapi perusahaan. Menurut Irfan Fahmi (2012:62) rasio *leverage* adalah mengukur seberapa besar perusahaan dibiayai dengan hutang. Rasio ini dapat melihat sejauh mana perusahaan dibiayai oleh hutang atau pihak luar dengan kemampuan perusahaan yang digambarkan oleh modal.

## 6. *Corporate Social Responsibility (CSR)*

*Corporate social responsibility (CSR)* adalah bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan sosialnya. CSR merupakan sebuah komitmen bisnis untuk bertindak etis, berkontribusi dalam pengembangan ekonomi, meningkatkan kualitas hidup pekerja, komunitas lokal, dan masyarakat luas (Holme dan Watts, 2006 dalam Pradita dan Supriyadi, 2015:2).

*Corporate Social Responsibility (CSR)* merupakan salah satu faktor penting keberlangsungan hidup sebuah perusahaan (Lanis dan Richardson, 2012 dalam Muzakki 2015:20). Hal ini karena sebuah perusahaan membutuhkan dukungan para *stakeholdernya* untuk menjalankan operasional

perusahaan. Sementara CSR adalah tindakan sosial sebagai bentuk tanggung jawab sebuah perusahaan terhadap semua *stakeholdernya*.

## **B. Penurunan Hipotesis**

### **1. *Corporate Governance dan Tax Avoidance***

Kepemilikan manajerial adalah besarnya kepemilikan saham yang dimiliki oleh pihak manajerial perusahaan. Jensen dan Meckling (1976) dalam Kusumawardhani (2012:42) menyatakan bahwa semakin besar proporsi kepemilikan saham oleh manajemen dalam suatu perusahaan maka manajemen akan berupaya lebih giat untuk memenuhi kepentingan pemegang saham yang juga adanya dirinya sendiri. Pohan (2008) dalam Syeldila dan Niki (2015:87) mengatakan bahwa semakin besar proporsi kepemilikan saham oleh manajerial maka akan semakin baik kinerja perusahaan, dikarenakan hal tersebut membantu menyatukan kepentingan pemegang saham dan manajer.

Penelitian-penelitian sebelumnya pernah dilakukan oleh Refila (2015) dan Ayu, Endang, dan Rosalita (2016) yang hasilnya menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan teori, logika, dan penelitian terdahulu, maka dapat ditarik hipotesis, yaitu:

**H<sub>1</sub>: Kepemilikan Manajerial berpengaruh terhadap *tax avoidance***

Perusahaan yang kepemilikan sahamnya lebih besar dimiliki oleh institusi perusahaan lain maupun pemerintah, maka kinerja dari manajemen perusahaan untuk dapat memperoleh laba sesuai dengan yang diinginkan akan cenderung diawasi oleh investor institusi. Hal tersebut mendorong manajemen untuk dapat meminimalkan nilai pajak yang terutang oleh perusahaan.

Penelitian yang dilakukan oleh Shafer dan Simmons (2006) menemukan bahwa Kepemilikan Institusional memainkan peran penting dalam memantau,

mendisiplinkan dan mempengaruhi manajer dalam manajemen pajak. Argumentasi di atas didukung oleh penelitian Khurana dan Moser (2009) yang menemukan besar atau kecilnya konsentrasi Kepemilikan Institusional akan mempengaruhi kebijakan penghindaran pajak oleh perusahaan, dimana apabila semakin besarnya konsentrasi kepemilikan saham jangka pendek (*short-term shareholder*) institusional, maka akan meningkatkan penghindaran pajak, tetapi apabila semakin besar konsentrasi kepemilikan saham jangka panjang (*long-term shareholder*) maka akan semakin mengurangi tindakan kebijakan penghindaran pajak. Berdasarkan teori, logika, dan penelitian terdahulu, maka dapat ditarik hipotesis, yaitu:

**H<sub>2</sub>: Kepemilikan Institutional berpengaruh terhadap *tax avoidance***

Dari perspektif teori agensi, anggota Dewan Komisaris yang berasal dari luar perusahaan (Komisaris Independen) berperan untuk mengawasi jalannya peran eksekutif yang lain (Solomon, 2007 dalam Syeldila dan Niki, 2015:85). Apabila tidak ada pengawasan dari Komisaris Independen, maka akan semakin besar kemungkinan eksekutif yang lain dapat memanipulasi posisi mereka dengan mendapatkan kontrol yang penuh atas remunerasi mereka sendiri dan mengamankan jabatan mereka (Solomon, 2007 dalam Syeldila dan Niki, 2015:85), sehingga dapat merugikan pemegang saham. Sebaliknya, semakin besar Proporsi Komisaris Independen, maka akan dapat meningkatkan kinerja dan kekayaan pemegang saham (Minnick dan Noga, 2010 dalam Syeldila dan Niki, 2015:86).

Sedangkan dari perspektif *stakeholder*, keberadaan Komisaris Independen dalam perusahaan merupakan strategi *stakeholder* untuk ikut memberi pengaruh dan mengawasi perusahaan sehingga memberi keuntungan bagi *stakeholder*. Beberapa penelitian terdahulu menemukan bahwa Proporsi Komisaris Independen berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *tax avoidance* (Timothy 2010; Lanis dan Richardson 2011; Setiana dan Setyowati 2014; Maharani dan Suardana 2014; Prakosa 2014; Syeldila dan Niki 2015).

Berdasarkan teori, logika, dan penelitian terdahulu, maka dapat ditarik hipotesis, yaitu:

**H3: Proporsi Dewan Komisaris berpengaruh terhadap *tax avoidance***

Komite Audit adalah orang atau sekelompok orang sekurang kurangnya tiga orang yang independen di dalam perusahaan yang dipilih juga secara independen yang mempunyai kapabilitas dan kompetensi dalam bidang akuntansi dan keuangan, komite audit bertanggung jawab kepada dewan komisaris (Pohan, 2008 dalam Syeldila dan Niki, 2015:90). Komite Audit berfungsi memberikan pandangan mengenai masalah-masalah yang berhubungan dengan kebijakan keuangan, akuntansi dan pengendalian internal perusahaan. Sementara BEI mensyaratkan paling sedikit Komite Audit harus tiga orang. Jadi jika kurang dari tiga orang maka tidak sesuai dengan peraturan BEI.

Dengan demikian, apabila jumlah komite audit dalam suatu perusahaan tidak sesuai dengan peraturan BEI maka akan meningkatkan tindakan manajemen dalam melakukan minimalisasi laba untuk kepentingan penghindaran pajak (*tax avoidance*). Secara empiris, para peneliti terdahulu telah membuktikan bahwa Komite Audit memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *tax avoidance* (Maharani dan Suardana 2014; Dewi dan Jati 2014; Annisa dan Kurniasih 2012; Ayu, Endang, dan Rosalita 2016; Syeldila dan Niki 2015). Berdasarkan teori, logika, dan penelitian terdahulu, maka dapat ditarik hipotesis, yaitu:

**H4: Komite Audit berpengaruh terhadap *tax avoidance***

Dalam implementasi CG, Kualitas Audit dengan pengungkapan yang transparan menjadi salah satu elemen yang penting. Transparansi terhadap pemegang saham dapat dicapai dengan melaporkan hal-hal terkait perpajakan pada pasar modal dan pertemuan para pemegang saham. Peningkatan transparansi dalam hal pajak kepada pemegang saham semakin dituntut oleh otoritas publik (Sartori, 2010 dalam Syeldila dan Niki, 2015:88).

Perusahaan yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) The Big Four biasanya menghasilkan kualitas audit yang semakin baik, dan akan semakin sulit melakukan kebijakan penghindaran pajak. Dengan demikian, apabila semakin berkualitas audit suatu perusahaan, maka perusahaan tersebut cenderung tidak melakukan manipulasi laba untuk kepentingan perpajakan (Chai dan Liu 2009 dalam Syeldila dan Niki, 2015:89). Secara empiris, para peneliti terdahulu telah membuktikan bahwa Kualitas Audit memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap *tax avoidance* (Annisa dan Kurniasih 2012; Maharani dan Suardana 2014; Dewi dan Jati 2014; Ayu, Endang, dan Rosalita 2016; Syeldila dan Niki 2015). Berdasarkan teori, logika, dan penelitian terdahulu, maka dapat ditarik hipotesis, yaitu:

**H<sub>5</sub>: Kualitas Audit berpengaruh terhadap *tax avoidance***

## 2. Ukuran Perusahaan dan *Tax Avoidance*

Perusahaan yang dikelompokkan ke dalam ukuran yang besar (memiliki aset yang besar) akan cenderung lebih mampu dan lebih stabil untuk menghasilkan laba jika dibandingkan dengan perusahaan dengan total aset yang kecil (Indriani, 2005 dalam Rachmawati dan Triatmoko, 2007). Laba yang besar dan stabil akan cenderung mendorong perusahaan untuk melakukan praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) karena laba yang besar akan menyebabkan beban pajak yang besar pula.

Perusahaan berskala kecil tidak dapat mengelola beban pajaknya secara optimal karena ahli dalam bidang perpajakan yang minim (Nicodeme, 2007 dalam Darmadi 2013). Berdasarkan teori agensi, sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan dapat digunakan oleh agent untuk memaksimalkan kompensasi kinerja agent, yaitu dengan cara menekan beban pajak perusahaan untuk memaksimalkan kinerja perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Nugroho (2011), Adelina (2012), Fatharani (2012), Darmawan (2014) Calvin (2015), Ida Ayu (2016), Yoanis dan Ni Ketut (2017), dan Vidiyanna (2017) menemukan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif

pada *tax avoidance*. Berdasarkan teori, logika, dan penelitian terdahulu, maka dapat ditarik hipotesis, yaitu:

**H<sub>6</sub>: Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance***

### 3. *Leverage dan Tax Avoidance*

*Leverage* adalah penggunaan dana dari pihak eksternal berupa hutang untuk membiayai investasi dan aset perusahaan. Pembiayaan melalui hutang terutama hutang jangka panjang akan menimbulkan beban bunga yang akan mengurangi beban pajak yang harus dibayar oleh perusahaan (Ngadiman dan Puspitasari, 2014:412). Semakin tinggi rasio *leverage*, berarti semakin tinggi utang pada pihak ketiga dan semakin tinggi pula biaya bunga yang timbul dari utang tersebut. Bunga atas pinjaman ini merupakan salah satu pemanfaatan *deductible expense* yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang No. 36 Tahun 2008. Biaya bunga yang semakin tinggi akan menyebabkan tingginya beban perusahaan yang akhirnya berkurangnya pajak yang dibayarkan perusahaan.

Penelitian Kurniasih dan Sari (2013) dan Annisa (2017) menunjukkan bahwa *leverage* terbukti memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan teori, logika, dan penelitian terdahulu, maka dapat ditarik hipotesis, yaitu:

**H<sub>7</sub>: *Leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance***

### 4. *Corporate Social Responsibility dan Tax Avoidance*

Perusahaan memiliki kewajiban untuk membayar pajak kepada pemerintah sebagai salah satu subjek pajak. Membayar pajak merupakan sebuah bentuk tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat. Dengan membayar pajak, berarti perusahaan mendukung dan memberikan kontribusi dalam rangka pembangunan infrastruktur dan aset publik yang dilakukan pemerintah dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang bertujuan mensejahterakan rakyat. Hal ini berarti perusahaan berkontribusi

dalam upaya mensejahterakan rakyat. Dowling dan Pfefer (1975) dalam Muzakki (2015:33) menyatakan bahwa dalam teori legitimasi perusahaan selalu berusaha menciptakan keselarasan antara nilai-nilai perusahaan dengan norma-norma sosial di lingkungan sosial sekitar, dimana perusahaan merupakan bagian dari lingkungan sosial tersebut.

Yoehana (2013), Winda (2015), Dyah (2015), dan Purwanggono (2015) menemukan bahwa CSR berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan teori, logika, dan penelitian terdahulu, maka dapat ditarik hipotesis, yaitu:

**H<sub>8</sub>: Corporate Social Responsibility berpengaruh terhadap tax avoidance**

**H<sub>9</sub>: Corporate Governance, Ukuran Perusahaan, Leverage, dan Corporate Social Responsibility berpengaruh terhadap tax avoidance secara simultan**

## BAB III METODE PENELITIAN

### A. Obyek Penelitian

Obyek penelitian ini adalah perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2016. Alasan memilih perusahaan manufaktur karena perusahaan manufaktur adalah jenis usaha yang bergerak disektor riil dan memiliki jumlah perusahaan paling banyak dibandingkan jenis usaha lain, serta terdiri dari beberapa sektor. Tren praktik penghindaran pajak perusahaan manufaktur periode 2001 - 2014 pun mengalami peningkatan (Astuti dan Aryani, 2016). Alasan memilih perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman karena perusahaan *consumer good* merupakan perusahaan yang tidak bisa dilepaskan dari kehidupan manusia terutama perusahaan subsektor makanan dan minuman, perusahaan ini terus mendapatkan tempat utama bagi para calon investor untuk menanamkan modalnya.

Penelitian juga dimotivasi karena ingin melihat apakah perusahaan manufaktur ini melakukan penghindaran pajak atau tidak, dimana perusahaan manufaktur mempunyai pangsa pasar yang cukup tinggi memungkinkan memiliki laba perusahaan yang besar, dengan begitu beban pajak yang dibayarkan perusahaan pun tinggi.

### B. Jenis Data

Jenis data adalah data sekunder yaitu *Annual Report* yang terdaftar di BEI tahun 2016, diperoleh dari situs resmi Indonesian Stock Exchange ([www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)). Data sekunder adalah data yang sudah tersedia sehingga peneliti hanya mencari dan mengumpulkannya.

### C. Teknik Pengambilan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2016. Teknik penarikan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling* yaitu metode penarikan sampel berdasarkan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh peneliti (Sekaran and Bougie 2010).

Adapun kriteria yang ditetapkan sebagai berikut:

(1) Perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang memuat dan mempublikasikan laporan keuangan yang berakhir 31 Desember periode 2016;

(2) Laporan keuangan tahunan disajikan menggunakan mata uang Rupiah. Penggunaan satuan mata uang selain Rupiah, meskipun dapat dikonversi, dapat menimbulkan perbedaan akibat kurs yang terus berubah;

(3) Perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang tidak mengalami rugi periode 2016;

(4) Perusahaan yang memiliki data-data lengkap terkait dengan variabel-variabel yang akan diteliti.

### D. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara menelusuri *annual report*. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan *documentary study* dan *content analysis*. *Documentary study* adalah suatu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar maupun dokumen elektronik. Dokumen yang diperoleh kemudian dianalisis, dibandingkan dan dipadukan membentuk suatu kajian yang sistematis. *Content analysis* merupakan metode pengumpulan data penelitian melalui teknik observasi dan analisis terhadap isu atau pesan dari suatu dokumen, misalnya iklan, laporan tahunan, kontrak kerja dll. Tujuan melakukan *content analysis* adalah melakukan identifikasi terhadap karakteristik atau informasi spesifik yang

terdapat pada suatu dokumen untuk menghasilkan deskripsi yang objektif dan sistematik, hasilnya antara lain kategori isi, telaah, pemberian kode berdasarkan karakteristik kejadian atau transaksi yang terdapat dalam suatu dokumen.

## **E. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel**

### **1. Variabel Dependen**

Variabel dependen atau variabel terikat adalah variabel yang dijelaskan oleh variabel independen atau variabel bebas. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah *tax avoidance*. *Tax avoidance* adalah usaha untuk mengurangi atau bahkan meniadakan hutang pajak yang harus dibayar perusahaan dengan tidak melanggar undang-undang yang ada.

Variabel ini di proksikan dengan menggunakan rumus Tarif Pajak Efektif (ETR). Tarif pajak efektif digunakan sebagai pengukuran karena dianggap dapat merefleksikan perbedaan tetap antara perbedaan laba buku dan laba fiskal. Tarif Pajak Efektif (ETR) dihitung dengan menggunakan cara membagi total beban pajak perusahaan dengan menggunakan cara membagi total beban pajak perusahaan dengan laba sebelum pajak penghasilan.

$$\text{ETR} = \frac{\text{Beban Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

ETR menjelaskan persentase atau rasio antara beban pajak penghasilan perusahaan yang harus dibayarkan kepada pemerintah dari total pendapatan perusahaan sebelum pajak.

### **2. Variabel Independen**

Variabel independen atau variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi variabel dependen atau variabel terikat. Variabel independen

dalam penelitian ini adalah *corporate governance*, ukuran perusahaan, *leverage*, dan *corporate social responsibility (CSR)*.

**a. Kepemilikan Manajerial (KM)**

Kepemilikan manajerial merupakan pemisahan kepemilikan antara pihak *outsider* dengan pihak *insider*. Jika dalam suatu perusahaan memiliki banyak pemilik saham, maka kelompok besar individu tersebut sudah jelas tidak dapat berpartisipasi dengan aktif dalam manajemen perusahaan sehari-hari. Karenanya, mereka memilih dewan komisaris, yang memilih dan mengawasi manajemen perusahaan. Struktur ini berarti bahwa pemilik berbeda dengan manajer perusahaan. Hal ini memberikan stabilitas bagi perusahaan yang tidak dimiliki oleh perusahaan dengan pemilik merangkap manajer (Bodie, 2006).

Besarnya kepemilikan manajerial diukur melalui jumlah saham yang dimiliki manajemen dibandingkan dengan jumlah saham yang beredar.

$$KM = \frac{\text{Saham yang dimiliki Manajemen}}{\text{Jumlah Saham yang beredar}}$$

**b. Kepemilikan Institusional (KI)**

Besar kecilnya kepemilikan institusional maka akan mempengaruhi penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Dalam penelitian ini Kepemilikan Institusional diukur menggunakan presentase (Khurana and Moser 2009).

Besarnya kepemilikan institusional diukur melalui jumlah saham yang dimiliki institusi dibandingkan dengan jumlah saham yang beredar.

$$KI = \frac{\text{Saham yang dimiliki Institusi}}{\text{Jumlah Saham yang beredar}}$$

**c. Dewan Komisaris (DK)**

Keberadaan variabel Proporsi Komisaris Independen yang menunjang kinerja perusahaan dan meningkatkan efektifitas aktifitas monitoring diukur dengan menggunakan persentase dewan komisaris yang ada dalam suatu perusahaan (Siallagan dan Machfoedz 2006).

Besarnya dewan komisaris diukur melalui jumlah komisaris independen dibandingkan dengan total dewan komisaris yang ada pada perusahaan

$$\text{KoA} = \frac{\text{Jumlah Komisaris Independen}}{\text{Jumlah total Dewan Komisaris}}$$

**d. Komite Audit (KoA)**

Kehadiran Komite Audit diharapkan dapat memberikan pandangan mengenai masalah- masalah yang berhubungan dengan kebijakan keuangan, akuntansi dan pengendalian internal (Mayangsari 2003). Dalam penelitian ini Komite Audit diukur dengan menggunakan jumlah Komite Audit dalam suatu perusahaan. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 8/14/PBI/2006 tentang pelaksanaan *good corporate govenance* jumlah anggota komite audit minimal 3 orang.

**e. Kualitas Audit (KuA)**

Kualitas audit biasa diukur berdasarkan besar atau kecilnya ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP) yang melakukan audit pada suatu perusahaan. Jika perusahaan diaudit oleh KAP *The Big Four*, maka akan lebih independen karena lebih dapat bertahan dari tekanan manajer untuk melaporkan adanya pelanggaran (Kurniasih dan Sari 2013).

Dalam penelitian ini perusahaan yang diaudit oleh KAP *The Big Four* yaitu *Price Waterhouse Cooper-PWC, Deloitte Touche Tohmatsu, KPMG, Ernst & Young-E&Y* akan diberi nilai 2, dan apabila tidak diaudit oleh keempat KAP di bawah lisensi KAP *The Big Four* akan diberi nilai 1.

**f. Ukuran Perusahaan (*Size*)**

Ukuran perusahaan diproksi dengan total asset karena nilai total aset biasanya sangat besar dibandingkan variabel keuangan lainnya, maka dengan maksud untuk mengurangi peluang heteroskedastis, variabel aset ‘diperhalus’ menjadi  $\text{Log}(\text{asset})$  atau  $\text{Ln}(\text{asset})$  Asnawi dan Wijaya (2005:274).

$$\text{Size} = \log(\text{total assets})$$

**g. Leverage (*Lev*)**

*Leverage* adalah kemampuan perusahaan menggunakan utang untuk membiayai aktiva, baik utang jangka panjang maupun utang jangka pendek. Variabel ini diukur menggunakan *debt to total asset ratio* (DAR) untuk mengetahui jumlah aset perusahaan yang dibiayai oleh utang.

$$\text{Lev} = \frac{\text{Jumlah Hutang}}{\text{Jumlah Aset}}$$

**h. Corporate Social Responsibility (*CSR*)**

Sembiring (2005) menyatakan bahwa dalam memperoleh data mengenai pengungkapan tanggung jawab sosial menggunakan *checklist* dalam tujuh kategori, yaitu lingkungan, energi, kesehatan dan keselamatan tenaga kerja, lain-lain tenaga kerja, produk, keterlibatan masyarakat, dan umum. Item pengungkapan dalam penelitian ini mengikuti penelitian yang dilakukan oleh Sembiring (2005).

Karena dalam penelitiannya item pengungkapan CSR telah disesuaikan dengan kondisi di Indonesia. Jadi terdapat 79 item pengungkapan yang mana nantinya masih disesuaikan dengan masing-masing sektor. Adapun score untuk tiap checklist adalah score 0, jika perusahaan tidak mengungkapkan item pada daftar pertanyaan dan score 1, jika perusahaan mengungkapkan item pada daftar pertanyaan. Selanjutnya score dari tiap item dijumlah untuk

memperoleh score keseluruhan tiap perusahaan. Rumus untuk menghitung CSRDI adalah sebagai berikut:

$$CSRDI_j = \frac{\sum X_j}{N_j}$$

Keterangan

$CSRDI_j$ : *Corporate Social Responsibility Disclosure Index* perusahaan j

$X_j$  : Jumlah item yang diungkapkan oleh perusahaan j (nilai 1 jika item j diungkapkan; nilai 0 jika item j tidak diungkapkan)

$N_j$  : jumlah item pengungkapan CSR,  $n_j \leq 79$

## F. Uji Kualitas Data

### 1. Uji Statistik Deskriptif

Uji statistik deskriptif untuk memberikan informasi karakteristik variabel penelitian. Analisis ini disajikan dengan menggunakan tabel statistik deskriptif yang memaparkan nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata (*mean*), dan standar deviasi (*standard deviation*).

### 2. Uji Asumsi Klasik

Sebelum dilakukan uji hipotesis terlebih dahulu dilakukan uji kualitas data yaitu uji asumsi klasik. Terdapat empat uji asumsi klasik yaitu:

#### a. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas untuk melihat apakah ada korelasi antar variabel independen. Nazaruddin (2009) menyatakan bahwa uji multikolinearitas adalah uji yang ditujukan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (variabel Independen). Model uji regresi sebaiknya tidak terjadi multikolinearitas. Multikolinearitas dapat dilihat dari nilai *tolerance* atau VIF, jika  $VIF < 10$  dan nilai *tolerance*  $> 0,1$  maka data bebas multikolinearitas.

### **b. Uji Autokorelasi**

Uji autokorelasi digunakan untuk menguji ada tidaknya korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode  $t$  dengan periode  $t-1$  pada persamaan regresi linear. Apabila terjadi korelasi maka menunjukkan adanya problem autokorelasi. Problem autokorelasi mungkin terjadi pada data *timeseries* (data runtun waktu). Salah satu cara untuk mendeteksi autokorelasi adalah dengan Uji *Durbin-Watson* (Nazaruddin, 2009). Jika  $du < dw < 4 - du$  maka tidak terjadi autokorelasi. Model regresi yang baik adalah model regresi yang bebas autokorelasi.

### **c. Uji Heteroskedastisitas**

Uji heteroskedastisitas yaitu suatu pengujian untuk melihat apakah data mempunyai varian yang sama (homogen) atau data mempunyai varian yang tidak sama (heterogen). Untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas digunakan metode *Glejser*. Jika nilai signifikan ( $\text{sig}$ )  $> \alpha$  maka tidak ada masalah heteroskedastisitas. Data yang baik adalah data yang homogen.

### **d. Uji Normalitas**

Uji normalitas adalah suatu pengujian untuk mengetahui apakah data berdistribusi normal atau tidak. Data yang baik adalah yang berdistribusi normal. Cara untuk mendeteksi apakah data berdistribusi normal atau tidak dapat dilihat pada uji statistik dengan *Kolmogorov-Smirnov Z (I-Sample K-S)*. Jika nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)*  $< 0,05$ , maka hipotesis ditolak, karena data residual tidak berdistribusi normal dan jika nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)*  $> 0,05$ , maka hipotesis diterima karena data residual berdistribusi normal (Ghozali, 2009 dalam Putra, 2011).

## **3. Uji Hipotesis**

Pengujian hipotesis pada penelitian ini menggunakan regresi linier berganda karena menguji pengaruh beberapa variabel independen terhadap

satu variabel dependen. Uji hipotesis dilakukan dengan menggunakan alat analisis SPSS 15.0.

Persamaan regresi dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$TA = \alpha + \beta_1 KM + \beta_2 KI + \beta_3 DK + \beta_4 KoA + \beta_5 KuA + \beta_6 Size + \beta_7 Lev + \beta_8 CSR + e$$

Keterangan:

TA : *Tax Avoidance*

$\alpha$  : Konstanta

KM : Kepemilikan Manajerial

KI : Kepemilikan Institusional

DK : Dewan Komisaris

KoA : Komite Audit

KuA : Kualitas Audit

Size : Ukuran Perusahaan

Lev : *Leverage*

CSR : *Corporate Social Responsibility*

$\beta_1 - \beta_8$  : Koefisien variabel bebas

e : error term

## BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Gambaran Umum Obyek Penelitian

Perusahaan yang menjadi obyek dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur subsektor Makanan dan Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2016. Pada tahun 2016 perusahaan manufaktur subsektor Makanan dan Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia terdapat 13 perusahaan. Berikut perincian jumlah perusahaan yang memenuhi kriteria dalam pengambilan sampel dapat dilihat pada tabel 2:

**Tabel 2. Proses Pengambilan Sampel**

<b>Keterangan</b>	<b>Jumlah Perusahaan</b>
Perusahaan manufaktur subsektor Makanan dan Minuman yang terdaftar di BEI tahun 2016	13
Perusahaan yang tidak mempublikasikan laporan keuangan tahun 2016	(1)
Perusahaan yang tidak menyajikan laporan keuangan dalam mata uang rupiah	(0)
Perusahaan yang mengalami rugi pada tahun 2016	(0)
Perusahaan yang tidak memiliki data-data lengkap	(2)
<b>Perusahaan yang memenuhi kriteria sampel</b>	<b>10</b>

### B. Uji Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif pada penelitian ini menyajikan jumlah data, nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata (*mean*), dan *standart deviation*. Adapun statistik deskriptif disajikan dalam tabel berikut:

**Tabel 3. Statistik Deskriptif**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
KM	10	,00	25,22	3,75	8,35
KI	10	36,74	91,52	72,47	18,86
DK	10	,33	,57	,38	,07
KoA	10	2,00	4,00	3,00	,47
KuA	10	,00	1,00	,50	,53
Size	10	11,75	13,91	12,53	,65
Lev	10	,15	,64	,44	,16
CSR	10	,46	,54	,49	,02
TA	10	,09	,34	,22	,07
Valid N (listwise)	10				

Sumber : Hasil Data Olahan

Tabel 2. memberikan gambaran statistik deskriptif pada setiap variabel penelitian. Jumlah pengamatan dalam penelitian ini adalah 10 sampel. Variabel Kepemilikan Manajerial memiliki nilai minimum ,00 ; nilai maksimum 25,22 ; nilai rata-rata 3,75 ; dan nilai standar deviasi sebesar 8,35.

Variabel Kepemilikan Instusional memiliki nilai minimum 36,74; nilai maksimum 91,52; nilai rata-rata 72,47; dan nilai standar deviasi sebesar 18,86. Variabel Dewan Komisaris memiliki nilai minimum ,33; nilai maksimum ,57; nilai rata-rata ,38; dan nilai standar deviasi sebesar ,07.

Variabel Komite Audit memiliki nilai minimum 2,00; nilai maksimum 4,00; nilai rata-rata 3,00; dan nilai standar deviasi sebesar ,47. Variabel

Kualitas Audit memiliki nilai minimum ,00; nilai maksimum 1,00; nilai rata-rata ,50; dan nilai standar deviasi sebesar ,53.

Variabel Ukuran Perusahaan memiliki nilai minimum 11,75; nilai maksimum 13,91; nilai rata-rata 12,53; dan nilai standar deviasi sebesar ,65.

Variabel *Leverage* memiliki nilai minimum ,15; nilai maksimum ,64; nilai rata-rata ,44; dan nilai standar deviasi sebesar ,16.

Variabel *Corporate Social Responsibility* memiliki nilai minimum ,46; nilai maksimum ,54; nilai rata-rata ,49; dan nilai standar deviasi sebesar ,02.

Variabel *Tax Avoidance* memiliki nilai minimum ,09; nilai maksimum ,34; nilai rata-rata ,22; dan nilai standar deviasi sebesar ,07.

### C. Uji Asumsi Klasik

#### 1. Uji Multikolinearitas

Hasil uji multikolinieritas menggunakan metode *variance inflation factors* (VIF) disajikan pada tabel 4.

**Tabel 4. Hasil Uji Multikolinearitas**

Model	Variabel Independen	Collinierity Statistic		Kesimpulan
		Tolerance	VIF	
1	KM	,359	2,783	Non Multikolinieritas
	KI	,101	10,054	Non Multikolinieritas
	DK	,322	3,108	Non Multikolinieritas
	KoA	,590	1,695	Non Multikolinieritas
	Kua	,117	8,555	Non Multikolinieritas
	<i>Size</i>	,143	6,972	Non Multikolinieritas
	<i>Lev</i>	,236	4,231	Non Multikolinieritas
	CSR	,135	7,423	Non Multikolinieritas

Sumber : Hasil Olahan Data

Tabel 4. menunjukkan nilai *tolerance* menunjukkan semua variabel independen dalam penelitian ini lebih besar dari 10% dan nilai VIF (*Variance*

*Inflation Factor*) untuk semua variabel kurang dari 10. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinieritas dalam penelitian.

## 2. Uji Autokorelasi

Deteksi ada tidaknya autokorelasi dilakukan dengan uji *Durbin Watson* yang disajikan pada tabel 5.

**Tabel 5. Hasil Uji Autokorelasi**

Model	Du	4-du	DW	Kesimpulan
1	0,1469	3,2658	2,581	Tidak terjadi autokorelasi

Sumber : Hasil Olahan Data

Tabel 5. menunjukkan nilai DW 2,581 berada diantara batas atas (du) 0,1469 dan kurang dari 3,2658 (4-du), maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat autokorelasi.

## 3. Uji Heteroskedastisitas

Hasil uji heteroskedastisitas dengan menggunakan metode *Glejster* disajikan pada tabel 6.

Hasil Uji *Glejser* menunjukkan tidak satupun variabel bebas yang signifikan secara statistik mempengaruhi variabel terikat. Hal ini terlihat dari tingkat probabilitas signifikansi di atas 5%. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas.

**Tabel 6. Hasil Uji Heteroskedastisitas**

Model	Variabel Independen	T	Sig	Kesimpulan
1	KM	1,448	,385	Non Heteroskedastisitas
	KI	-10,769	,059	Non Heteroskedastisitas
	DK	-21,691	,029	Non Heteroskedastisitas
	KoA	4,059	,154	Non Heteroskedastisitas
	KuA	13,025	,049	Non Heteroskedastisitas
	Size	-13,512	,047	Non Heteroskedastisitas
	Lev	16,628	,038	Non Heteroskedastisitas
	CSR	-2,887	,212	Non Heteroskedastisitas

Sumber : Hasil Olahan Data

#### 4. Uji Normalitas

Uji normalitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah *One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test*. Pengambilan keputusan data berdistribusi normal atau tidak berdistribusi normal dengan melihat nilai probabilitas. Apabila nilai probabilitasnya  $> 5\%$  maka data tidak berdistribusi normal. Hasil pengujian normalitas disajikan pada tabel 7.:

**Tabel 7. Hasil Uji Normalitas**

		Unstandardized Residual
N		10
Normal Parameters(a,b)	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,00125401
Most Extreme Differences	Absolute	,169
	Positive	,169
	Negative	-,117
Kolmogorov-Smirnov Z		,169
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200

Sumber : Hasil Olahan Data

Nilai *Asymp. Sig (2-tailed)* yang diperoleh melalui uji *One-Sample Kolmogorov-Smirnov (KS)* sebesar 0,200 menunjukkan lebih besar dari  $\alpha$  (0,05), maka dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal.

#### D. Uji Hipotesis

##### 1. Koefisien Determinasi

**Tabel 8. Hasil Uji Koefisien Determinasi**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	1,000 <sup>a</sup>	1,000	,997	,00376	2,581

Sumber : Hasil Olahan Data

Berdasarkan Tabel 10. tampak bahwa besarnya koefisien determinasi (*Adjusted R<sup>2</sup>*) adalah 0,997 atau 99,7%, hal ini menunjukkan bahwa kemampuan variabel independen dalam hal ini adalah *corporate governance*, ukuran perusahaan, *leverage*, dan *corporate social responsibility* secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance* sebesar 99,7%, sedangkan sisanya sebesar 0,3% (100% - 99,7%) dijelaskan oleh variabel lain yang tidak masuk dalam model.

## 2. Uji Pengaruh Simultan (Uji Nilai F)

**Tabel 9. Hasil Uji Pengaruh Simultan**

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	,044	8	,005	388,137	,039 <sup>b</sup>
	Residual	,000	1	,000		
	Total	,044	9			

Berdasarkan tabel 9. diperoleh nilai F test sebesar 388,137 dan nilai signifikansi (0,039) < alpha (0,05) yang artinya terdapat pengaruh secara bersama-sama variabel independen dalam hal ini *orporate governance*, ukuran perusahaan, *leverage*, dan *corporate social responsibility* terhadap variabel dependen yaitu *tax avoidance*.

### 3. Uji Parsial (Uji Nilai t)

Berdasarkan hasil pengujian dengan menggunakan alat analisis regresi linear berganda diperoleh hasil seperti yang tampak pada tabel 10.

**Tabel 10. Hasil Uji Parsial**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-,653	,000			
KM	,00	,005	,056	,079	,944
KI	-,002	,001	-,540	-1,815	,107
DK	,307	,314	,327	,979	,356
KoA	-,070	,046	-,472	-1,515	,168
KuA	,019	,032	,277	3,961	,060
Size	,068	,029	,638	2,343	,047
Lev	,032	,157	,071	,202	,845
CSR	2,029	,800	,668	2,538	,035

a. Dependent Variable: *Tax Avoidance*

Sumber: Hasil Olahan Data

Hasil pengujian terhadap hipotesis-hipotesis penelitian adalah sebagai berikut:

#### a. Pengujian Hipotesis Satu

Tabel 10. menunjukkan bahwa variabel kepemilikan manajerial memiliki nilai koefisien regresi sebesar .005 dengan signifikansi sebesar 0.944 > alpha (0.05) sehingga variabel kepemilikan manajerial terbukti tidak berpengaruh terhadap variabel *tax avoidance*.

#### b. Pengujian Hipotesis Dua

Tabel 10. menunjukkan bahwa variabel kepemilikan independen memiliki nilai koefisien regresi sebesar .001 dengan signifikansi sebesar 0.107 > alpha

(0.05) sehingga variabel kepemilikan independen terbukti tidak berpengaruh terhadap variabel *tax avoidance*.

c. Pengujian Hipotesis Tiga

Tabel 10. menunjukkan bahwa variabel dewan komisaris memiliki nilai koefisien regresi sebesar .314 dengan signifikansi sebesar  $0.356 > \alpha (0.05)$  sehingga variabel dewan komisaris terbukti tidak berpengaruh terhadap variabel *tax avoidance*.

d. Pengujian Hipotesis Empat

Tabel 10. menunjukkan bahwa variabel komite audit memiliki nilai koefisien regresi sebesar .046 dengan signifikansi sebesar  $0.168 > \alpha (0.05)$  sehingga variabel komite audit terbukti tidak berpengaruh terhadap variabel *tax avoidance*.

e. Pengujian Hipotesis Lima

Tabel 10. menunjukkan bahwa variabel kualitas audit memiliki nilai koefisien regresi sebesar .032 dengan signifikansi sebesar  $0.060 > \alpha (0.05)$  sehingga variabel kualitas audit terbukti tidak berpengaruh terhadap variabel *tax avoidance*. Sehingga bisa ditarik kesimpulan variabel *corporate governance* terbukti tidak berpengaruh terhadap variabel *tax avoidance*.

f. Pengujian Hipotesis Enam

Tabel 10. menunjukkan bahwa variabel ukuran perusahaan memiliki nilai koefisien regresi sebesar .029 dengan signifikansi sebesar  $0.047 < \alpha (0.05)$

sehingga variabel ukuran perusahaan terbukti memiliki pengaruh terhadap variabel *tax avoidance*.

g. Pengujian Hipotesis Tujuh

Tabel 10. menunjukkan bahwa variabel *leverage* memiliki nilai koefisien regresi sebesar .800 dengan signifikansi sebesar  $0.845 > \alpha (0.05)$  sehingga variabel *leverage* terbukti tidak berpengaruh terhadap variabel *tax avoidance*.

h. Pengujian Hipotesis Delapan

Tabel 10. menunjukkan bahwa variabel *corporate social responsibility* memiliki nilai koefisien regresi sebesar .0157 dengan signifikansi sebesar  $0.035 < \alpha (0.05)$  sehingga variabel *corporate social responsibility* terbukti berpengaruh terhadap variabel *tax avoidance*.

Secara keseluruhan hasil pengujian hipotesis dengan dapat dilihat pada tabel 11.

**Tabel 11. Ringkasan Hasil Pengujian Hipotesis**

Kode	Hipotesis	Sig	Hasil
H <sub>1</sub>	Kepemilikan Manajerial berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> .	,944	ditolak
H <sub>2</sub>	Kepemilikan Independen berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> .	,107	ditolak
H <sub>3</sub>	Dewan Komisaris berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> .	,356	ditolak
H <sub>4</sub>	Komite Audit berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> .	,168	ditolak
H <sub>5</sub>	Kualitas Audit berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> .	,060	ditolak
H <sub>6</sub>	Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> .	,047	diterima
H <sub>7</sub>	<i>Leverage</i> berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> .	,845	ditolak
H <sub>8</sub>	<i>Corporate Social Responsibility</i> berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> .	,035	diterima

H <sub>9</sub>	<i>Corporate Governance</i> , Ukuran Perusahaan, <i>Leverage</i> , dan <i>Corporate Social Responsibility</i> berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> secara simultan	,039	diterima
----------------	---	------	----------

Sumber: Hasil Olah Data

## E. Pembahasan

Penelitian ini menguji pengaruh *corporate governance*, ukuran perusahaan, *leverage*, dan *corporate social responsibility* terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan terhadap beberapa hipotesis dalam penelitian, hasilnya menunjukkan bahwa semua variabel independen dalam penelitian ini tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen yaitu *Tax Avoidance*.

### 1. Pengaruh *corporate governance* terhadap *tax avoidance*

Hasil pengujian hipotesis pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima membuktikan bahwa *corporate governance* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* yang ditunjukkan dengan tingkat signifikansi 0.944. Temuan penelitian ini bermakna bahwa tinggi atau rendahnya variasi penghindaran pajak (*tax avoidance*) tidak ditentukan oleh variabel *corporate governance*.

Dengan kata lain tinggi atau rendahnya persentase saham yang dimiliki manajemen dan institusi dibandingkan dengan jumlah saham yang diterbitkan atau saham beredar tidak akan memberikan dampak yang berarti terhadap perilaku penghindaran pajak. Tinggi atau rendahnya jumlah komisaris independen terhadap jumlah total dewan komisaris tidak akan memberikan dampak yang berarti terhadap perilaku penghindaran pajak. Jumlah anggota komite audit dalam

perusahaan dan kualitas audit perusahaan juga tidak memberikan dampak yang berarti terhadap perilaku penghindaran pajak.

Temuan penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian terdahulu (Maharani dan Suardana 2014; Dewi dan Jati 2014; Annisa dan Kurniasih 2012) dimana variabel *corporate governance* tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

## 2. Pengaruh ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance*

Dari hasil uji t diperoleh bahwa nilai signifikansi ukuran perusahaan adalah .047. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI tahun 2016, maka hipotesis keenam diterima. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Nugroho (2011), Adelina (2012), Fatharani (2012), Darmawan (2014) dan Calvin (2015) yang menemukan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh *tax avoidance*.

Perusahaan yang dikelompokkan ke dalam ukuran yang besar (memiliki aset yang besar) akan cenderung lebih mampu dan lebih stabil untuk menghasilkan laba jika dibandingkan dengan perusahaan dengan total aset yang kecil (Indriani, 2005 dalam Rachmawati dan Triatmoko, 2007).

Berdasarkan teori agensi, sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan dapat digunakan oleh *agent* untuk memaksimalkan kompensasi kinerja *agent*, yaitu dengan cara menekan beban pajak perusahaan untuk memaksimalkan kinerja perusahaan. Teori kekuasaan politik menyatakan bahwa perusahaan besar akan lebih agresif untuk melakukan penghindaran pajak agar mencapai penghematan

beban pajak yang optimal karena memiliki sumber daya yang besar untuk mempengaruhi kebijaksanaan umum (pemerintah) yang dikehendaki dan menguntungkan perusahaan termasuk untuk melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*).

### 3. Pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance*

Pada Tabel 10. dari hasil pengujian untuk variabel *leverage* yaitu nilai signifikansi sebesar 0.845, dapat disimpulkan bahwa *leverage* tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *tax avoidance*. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kurniasih dan Sari (2013) yang menyatakan bahwa *leverage* tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *tax avoidance*. Semakin tinggi nilai dari rasio *leverage*, berarti semakin tinggi jumlah pendanaan dari hutang pihak ketiga yang digunakan perusahaan dan semakin tinggi pula biaya bunga yang timbul dari hutang tersebut yang akan memberikan pengaruh berkurangnya beban pajak perusahaan tidak menjadikan perusahaan melakukan pembiayaan dengan hutang sebesar-besarnya (Kurniasih dan Sari, 2013:61).

Ramlall (dalam Margaretha dan Ramadhan, 2010:120) menyatakan bahwa struktur modal yang optimal terjadi apabila *interest tax shield* seimbang dengan *leverage related cost* seperti *financial distress* dan *bankruptcy*. Untuk menghindari adanya penggunaan hutang 100% maka diperhitungkan juga biaya hutang atau *financial distress* yang disebut juga *cost of bankruptcy* yang menyebabkan perusahaan tidak dapat mencapai keuntungan optimal dari

pembiayaan 100% hutang. *Cost of bankruptcy* meliputi biaya langsung berupa biaya hukum dan administrasi likuidasi perusahaan termasuk di dalamnya biaya reorganisasi serta biaya-biaya tidak langsung. Perusahaan juga cenderung menggunakan sumber pembiayaan internal, lalu hutang dan terakhir menggunakan *equity*.

Namun hasil penelitian ini berlawanan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Richardson dan Lanis (2007) yang menyatakan bahwa *leverage* memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang dilakukan oleh perusahaan. Hal ini dikarenakan tingkat *leverage* yang tinggi akan mengakibatkan beban pajak yang rendah dimana biaya bunga yang ditimbulkan oleh pembiayaan dengan hutang merupakan biaya yang dapat dikurangkan dari pajak (*tax deductible*). Hal ini membuat perusahaan lebih memilih untuk melakukan kegiatan modal dengan hutang supaya dapat memanfaatkan keuntungan dari beban pajak yang ditimbulkan.

#### 4. Pengaruh *Corporate Social Responsibility* terhadap *tax avoidance*

Hasil uji hipotesis kedelapan dapat dilihat pada Tabel 10., variabel *corporate social responsibility* mempunyai nilai signifikansi sebesar 0.035. Hal ini berarti menerima hipotesis kedelapan sehingga dapat dikatakan bahwa *corporate social responsibility* berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Lanis dan Richardson (2012), Watson (2011), Huseynov dan Klamm (2012), serta Hoi et al (2013).

Perusahaan dengan peringkat rendah dalam CSR dianggap tidak bertanggung jawab sosial sehingga lebih agresif dalam menghindari pajak (Hoi et al, 2013). Perusahaan yang lebih bertanggung jawab sosial diharapkan bersifat kurang agresif terhadap pajak.

Pengurangan beban pajak dapat dilihat sebagai suatu hal yang biasa dalam perusahaan, karena dengan pengurangan biaya dapat meningkatkan profitabilitas, meningkatkan kekayaan pemegang saham. Tetapi pajak juga bergantung pada peraturan untuk mendukung program-program sosial pemerintah. Tindakan penghindaran pajak dilihat oleh beberapa orang sebagai tindakan tidak bertanggung jawab secara sosial, sebagai perusahaan tidak membayar dengan adil.

Mengingat bahwa perusahaan memiliki banyak *stakeholder* baik internal dan eksternal. Aktivitas CSR merupakan suatu tindakan yang tidak hanya memperhitungkan ekonomi tetapi juga sosial, lingkungan dan dampak lain dari tindakan yang dilakukan perusahaan sendiri sebagai bentuk tanggung jawab kepada para *stakeholder*. Tindakan agresivitas penghindaran pajak dipandang sebagai tindakan yang tidak etis dan tidak bertanggung jawab oleh publik, oleh karena itu tindakan penghindaran pajak tidak konsisten dengan CSR (Hoi et al, 2013).

##### 5. Pengaruh *Corporate Governance*, Ukuran Perusahaan, *Leverage*, dan CSR berpengaruh terhadap *tax avoidance* secara simultan

Hasil uji hipotesis kedelapan dapat dilihat pada Tabel 10. dengan nilai signifikansi (0,039) < alpha (0,05) yang artinya terdapat pengaruh

secara bersama-sama variabel independen dalam hal ini *corporate governance*, ukuran perusahaan, *leverage*, dan *corporate social responsibility* terhadap variabel dependen yaitu *tax avoidance*.

**STIE Widya Wiwaha**  
**Jangan Plagiat**

## BAB V SIMPULAN, SARAN, DAN KETERBATASAN PENELITIAN

### A. Simpulan

Berdasarkan analisis dan pengujian dari data dalam penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil pengujian hipotesis pertama, kedua ketiga, keempat, dan kelima menunjukkan bahwa *corporate governance* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.
2. Hasil pengujian hipotesis keenam menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance*.
3. Hasil pengujian hipotesis ketujuh menunjukkan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.
4. Hasil pengujian hipotesis kedelapan menunjukkan bahwa *corporate social responsibility* berpengaruh terhadap *tax avoidance*.
5. Hasil pengujian hipotesis kedelapan menunjukkan bahwa *corporate governance*, ukuran perusahaan, *leverage*, dan *corporate social responsibility* berpengaruh secara simultan terhadap *tax avoidance*.
6. Nilai koefisien determinasi dalam penelitian sebesar 0,997 yang berarti bahwa seluruh variabel independen (*corporate governance*, ukuran perusahaan, *leverage*, dan *corporate social responsibility*) dalam penelitian ini mampu mempengaruhi praktek penghindaran pajak sebesar 99,7% , sedangkan sisanya sebesar 0,03% dijelaskan oleh variabel lain diluar model.

## **B. Saran**

Penelitian ini di masa mendatang diharapkan dapat menyajikan hasil penelitian yang lebih bisa digeneralisir lagi dengan adanya beberapa saran mengenai beberapa hal diantaranya:

1. Penelitian selanjutnya disarankan menggunakan pengukuran selain CETR (*Cash Effective Tax Rate*) dalam mengukur *tax avoidance*.
2. Penelitian selanjutnya disarankan memperluas sampel, tidak hanya terbatas pada perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman serta menambah periode penelitian.
3. Peneliti yang akan datang dapat mempertimbangkan variabel lain dalam konsep *corporate governance* seperti variabel *managerial incentives*, karakteristik eksekutif (resiko perusahaan), kepemilikan keluarga dan lain-lain.
4. Melakukan penelitian secara berkelanjutan agar diketahui pengembangan pengungkapan *tax avoidance* dari tahun ke tahun.

## **C. Keterbatasan Penelitian**

1. Variabel-variabel yang digunakan hanya dari sisi perusahaan saja dan belum menggunakan faktor-faktor luar perusahaan atau faktor makro ekonomi.
2. Penelitian ini hanya meneliti praktek penghindaran pajak dalam 1 tahun, masih diperlukan penelitian yang lebih mendalam tentang praktek penghindaran pajak pada perusahaan di Indonesia dari tahun ke tahun.

3. Penelitian ini hanya meneliti praktek penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman, diperlukan penelitian yang lebih luas lagi yaitu pada semua industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

**STIE Widya Wiwaha**  
**Jangan Plagiat**

## DAFTAR PUSTAKA

- Armstrong, C.S., J.L. Blouin, A.D. Jagolinzer, dan D.F. Larcker. 2013. *Corporate Governance, incentives, and tax avoidance*. Rock Center for Corporate Governance Stanford University, Working Paper Series No. 136. Diakses dari <http://ssrn.com/abstract=2252682>.
- Annisa. 2017. *Pengaruh ROA, Leverage, Ukuran Perusahaan, dan Koneksi Politik Terhadap Penghindaran Pajak*. JOM Fekon Vol. 4 No.1.
- Annisa, N.A., dan L. Kurniasih. 2012. *Pengaruh corporate governance terhadap tax avoidance*. Jurnal Akuntansi & Auditing 8 (2): 95–189.
- Darmawan, I. G. H., dan I. M. Sukartha. 2014. *Pengaruh penerapan Corporate Governance, Leverage, ROA dan ukuran perusahaan pada penghindaran pajak*. E-Jurnal Akuntansi 9 (1): 143–161.
- Desai, Mihir A. and Dhammika Dharmapala. *Corporate Tax Avoidance And High-Powered Incentives*. *Journal of Financial Economics*, 2006, v79(1,Jan), 145-179.
- Dyreng, S., M. Hanlon, dan E.L. Maydew. 2008. *Long-run corporate tax avoidance*. *The Accounting Review* 83 (2): 61-82. Fernandes, V.
- Haruman, Tendi. 2008. *Pengaruh Struktur Kepemilikan terhadap Keputusan Keuangan dan Nilai Perusahaan: Survey pada Perusahaan Manufaktur di BEI*. Simposium Nasional Akuntansi XI. 23-24 Juli 2008, Pontianak.
- Khoala, A. 2013. *Does Corporate Governance affect tax planning? Evidence from American companies*. *International Journal of Advanced Research* 1 (10): 864–873.
- Khurana, I.K., dan W.J. Moser. 2009. *Institutional Ownership and Tax Aggressiveness*. Diakses dari [www.ssrn.com](http://www.ssrn.com).
- Kurniasih, T., dan M. Sari. 2013. *Pengaruh ROA, leverage, Corporate Governance, ukuran perusahaan, dan kompensasi rugi fiskal terhadap tax avoidance*. Buletin Studi Ekonomi 18 (1): 1–84.
- Lanis, R., dan G. Richardson. 2011. *The Effect of board of director composition on corporate tax aggressiveness*. *Journal of Accounting & Public Policy* 30 (1): 50–70.
- Laporan Kinerja Kemenkeu 2016. (2017, 23 Februari). Diperoleh 10 Oktober 2017, dari <https://www.kemenkeu.go.id/media/6561/laporan-kinerja-kemenkeu-2016.pdf>
- Lukviarman, N. 2006. *Etika bisnis tidak berjalan di Indonesia: Ada apa dalam Corporate Governance?* Jurnal Siasat Bisnis 9 (2): 139–156.

Mayangsari, S. 2003. *Analisis pengaruh independensi, kualitas audit, serta mekanisme Corporate Governance terhadap integritas laporan keuangan*. Surabaya: Simposium Nasional Akuntansi VI.

Minnick, K., dan T. Noga. 2010. *Do Corporate Governance characteristics influence tax management? Journal of Corporate Finance* 16 (5): 703–718.

Pohan, H. T. 2008. *Pengaruh Good Corporate Governance, rasio Tobin Q, perata laba terhadap penghindaran pajak pada perusahaan publik*. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Trisakti.

Putri, V. R., dan Putra, B.I. 2017. *Pengaruh Leverage, Profitability, Ukuran Perusahaan dan Proporsi Kepemilikan Institutional terhadap Tax Avoidance* Jurnal Ekonomi Manajemen Sumber Daya Vol.19 No.1.

Republik Indonesia. 2013. Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 Yang Mengatur Tentang Pajak Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Lembaran Negara RI Tahun 2013, No. 106. Sekretariat Negara. Jakarta.

Sandy, Syeldila dan Lukviarman, Niki. 2015. *Pengaruh Coporate Governance terhadap Tax Avoidance: Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur*. JAAI Volume 19 No.2: 85-98.

Setiana, D., dan W. Setyowati. 2014. *Pengaruh Corporate Governance, kompensasi rugi fiskal, ROA, leverage dan ukuran perusahaan terhadap tax avoidance*. *Journal Accounting and Banking* 3 (2).

Shafer, W., dan R. Simmons. 2006. *Social responsibility, machiavellianism and tax avoidance: A Study of Hong Kong tax professionals*. Working Paper No.5.

Solomon, J. 2007. *Corporate Governance and accountability*. 2nd ed. The Atrium, West Sussex: John Wiley & Sons, Ltd.